

OMBUDSMAN JAMBI TEGASKAN PEJABAT DIBAYAR NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Selasa, 04 November 2025 - jambi

Siaran Pers

Nomor : 007/HM.01-06/XI/2025

Senin, 3 November 2025

JAMBI - Berdasarkan konstitusi, negara dibentuk untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh pejabat dan penyelenggara negara dibayar oleh negara untuk memastikan rakyat sejahtera. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Zona Integritas Polda Jambi 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (3/11/2025) di Gedung Siginjai Polda Jambi. Hadir juga dalam kegiatan ini Wakapolda Jambi, Brigjen M Mustaqim yang membuka acara dan diikuti oleh seluruh Satuan Kerja yang ada di Polda Jambi dan jajaran Polres/ta di Provinsi Jambi.

Dijelaskan Saiful bahwa dalam hidup bernegara, pada dasarnya masyarakat tidak memiliki pribadi terhadap penyelenggara negara, melainkan berharap mereka menjalankan tugas pelayanan publik secara adil. Karena itu, ia mengingatkan bahwa penyelenggara negara seharusnya bersifat melayani.

"Kita jangan merasa hebat ketika menjadi pejabat. Kita sigaji rakyat untuk mensejahterakan mereka," sebut Saiful.

Di samping itu, dari segi pelayanan, masyarakat menginginkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Dijelaskan Saiful bahwa hal ini berlaku bagi seluruh bentuk layanan. "Baik itu pelayanan digital maupun non digital, masyarakat menginginkan yang mudah, murah, dan cepat," jelasnya.

Teruntuk jajaran kepolisian, Saiful mengatakan bahwa saat ini pelayanan kepolisian sudah mulai berbenah. Namun demikian, satu saja oknum berlaku buruk, seluruh instansi akan tercoreng. Hal ini dikarenakan kepercayaan publik terhadap pemerintah masih buruk.

"Yang bisa kita lakukan saat ini adalah terus bebuat yang terbaik, tanggap dan responsif," ungkap Saiful.

Wakapolda Jambi, M Mustaqim, juga menyampaikan hal senada bahwa pelayanan publik di Polda Jambi terus mengupayakan sikap terbuka terhadap saran dan kritik. Upaya ini dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitasi dan profesionalisme.

"Beberapa satwil dan satker juga sudah memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan nilai yang baik dari MenPANRB dan Ombudsman. Meskipun masih jauh dari sempurna, kita tetap dorong seluruh satuan untuk berikan yang terbaik dan bertanggung jawab," ujar Mustaqim.

Kepala Perwakilan

Saiful Roswandi

0812-7193-7291